

PERKEMBANGAN PENELITIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, DIALOG SOSIAL, DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH: ANALISIS BIBLIOMETRIK DAN AGENDA PENELITIAN MASA DEPAN

Moh Arief Kurniawan¹, Ahmad Badawi Saluy²

^{1, 2}Universitas Paramadina, Jl. Raya Mabes Hankam Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia

Email: moh.kurniawan@students.paramadina.ac.id

Article History

Received: 14-07-2026

Revision: 03-08-2026

Accepted: 08-08-2026

Published: 13-08-2026

Abstract. Industrial relations face increasingly complex challenges due to changing employment patterns, regulatory dynamics, and the increasing need for effective social dialogue mechanisms to maintain stable employment relations. Although studies on industrial relations continue to develop, comprehensive mapping of the relationship between social dialogue, government intervention, and industrial relations stability remains limited. This study aims to analyze the development of research themes, identify publication trends, and identify research gaps regarding the relationship between social dialogue, government intervention, and industrial relations stability through a Systematic Literature Review (SLR) approach. Data were obtained from the Scopus database with a publication range of 2015–2025. Literature selection was carried out using the PRISMA stages, which include identification, screening, eligibility assessment, and inclusion, resulting in 20 articles meeting the analysis criteria. Furthermore, bibliometric mapping was conducted using VOSviewer. The results show that collective bargaining (23 occurrences), industrial relations (15 occurrences), and trade unions (11 occurrences) are the most dominant themes, while studies on local government are still relatively limited (4 occurrences). These findings indicate an opportunity for research development on the role of local governments in strengthening social dialogue and supporting the creation of adaptive and sustainable industrial relations.

Keywords: Industrial Relations, Social Dialogue, Collective Bargaining, Local Government, Industrial Relations Stability.

Abstrak. Hubungan industrial menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat perubahan pola ketenagakerjaan, dinamika regulasi, dan meningkatnya kebutuhan akan mekanisme dialog sosial yang efektif dalam menjaga stabilitas hubungan kerja. Meskipun kajian mengenai hubungan industrial terus berkembang, pemetaan komprehensif mengenai keterkaitan dialog sosial, intervensi pemerintah, dan stabilitas hubungan industrial masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan tema penelitian, mengidentifikasi tren publikasi, serta menemukan kesenjangan penelitian mengenai hubungan antara dialog sosial, intervensi pemerintah, dan stabilitas hubungan industrial melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR). Data diperoleh dari basis data Scopus dengan rentang publikasi tahun 2015–2025. Seleksi literatur dilakukan menggunakan tahapan PRISMA yang meliputi identifikasi, penyaringan, penilaian kelayakan, dan inklusi sehingga diperoleh XX artikel yang memenuhi kriteria analisis. Selanjutnya, pemetaan bibliometrik dilakukan menggunakan VOSviewer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *collective bargaining* (23 occurrences), *industrial relations* (15 occurrences), dan *trade unions* (11 occurrences) merupakan tema yang paling dominan, sedangkan kajian mengenai *local government* masih relatif terbatas (4 occurrences). Temuan ini menunjukkan adanya peluang pengembangan penelitian mengenai peran pemerintah daerah dalam memperkuat dialog sosial dan mendukung terciptanya hubungan industrial yang adaptif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Hubungan Industrial, *Dialog Sosial*, *Collective Bargaining*, Pemerintah Daerah, Stabilitas Hubungan Industrial.

How to Cite: Kurniawan, M. A & Saluy, A. B. (2026). Perkembangan Penelitian Hubungan Industrial, Dialog Sosial, dan Peran Pemerintah Daerah: Analisis Bibliometrik dan Agenda Penelitian Masa Depan. *HORIZON: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 4 (4), 5333-5348. <http://doi.org/10.54373/hijm.v4i4.7102>

PENDAHULUAN

Perubahan lingkungan organisasi yang semakin kompleks telah membawa dampak signifikan terhadap dinamika hubungan industrial di berbagai negara. Globalisasi ekonomi, perkembangan teknologi, fleksibilisasi pasar kerja, serta perubahan kebijakan ketenagakerjaan telah membentuk pola hubungan kerja yang semakin dinamis dan menuntut mekanisme tata kelola yang lebih adaptif (Wilkinson et al., 2020; Kaufman, 2015; Visser, 2019). Dalam perspektif teori organisasi, perubahan lingkungan eksternal memengaruhi struktur organisasi, strategi adaptasi, serta stabilitas hubungan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah (Hyman, 2018; Baccaro & Howell, 2017). Oleh karena itu, penguatan hubungan industrial menjadi salah satu prasyarat penting untuk menciptakan keberlanjutan organisasi dan stabilitas sosial ekonomi.

Dalam sistem hubungan industrial, *collective bargaining* dan *social dialogue* merupakan mekanisme utama untuk membangun komunikasi, menyelesaikan konflik, serta mencapai kesepakatan antara pekerja dan pengusaha (Marginson, 2015; Müller & Schulten, 2019; Eurofound, 2021). Selain itu, serikat pekerja berperan dalam memperkuat posisi tawar pekerja, sedangkan pemerintah berfungsi sebagai regulator, mediator, dan fasilitator dalam menjaga keseimbangan hubungan industrial (Gumbrell-McCormick & Hyman, 2019; Upchurch & Mathers, 2018; Traxler, 2018). Seiring berkembangnya pola hubungan kerja modern yang ditandai dengan fleksibilisasi tenaga kerja, outsourcing, dan perubahan struktur organisasi, koordinasi antarpemangku kepentingan menjadi semakin penting untuk menjaga stabilitas hubungan industrial (Wilkinson et al., 2020; Kaufman, 2015).

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas *collective bargaining*, *industrial relations*, *trade unions*, *employment relations*, serta *social dialogue* sebagai faktor penting dalam membangun hubungan industrial yang efektif (Baccaro & Howell, 2017; Leonardi, 2018; Müller & Schulten, 2019). Kajian-kajian tersebut umumnya berfokus pada hubungan antara pekerja, pengusaha, dan serikat pekerja, serta pengaruh kebijakan ketenagakerjaan terhadap stabilitas hubungan industrial. Namun, pembahasan mengenai peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi dialog sosial dan menjaga stabilitas hubungan industrial masih relatif terbatas, meskipun pemerintah daerah memiliki kewenangan strategis dalam pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan di tingkat lokal (Eurofound, 2021; Molina & Rhodes, 2017).

Keterbatasan tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan penelitian mengenai bagaimana peran pemerintah daerah diposisikan dalam perkembangan kajian hubungan industrial serta sejauh mana tema tersebut mendapat perhatian dalam literatur ilmiah. Pemetaan yang komprehensif terhadap perkembangan topik penelitian diperlukan untuk mengidentifikasi

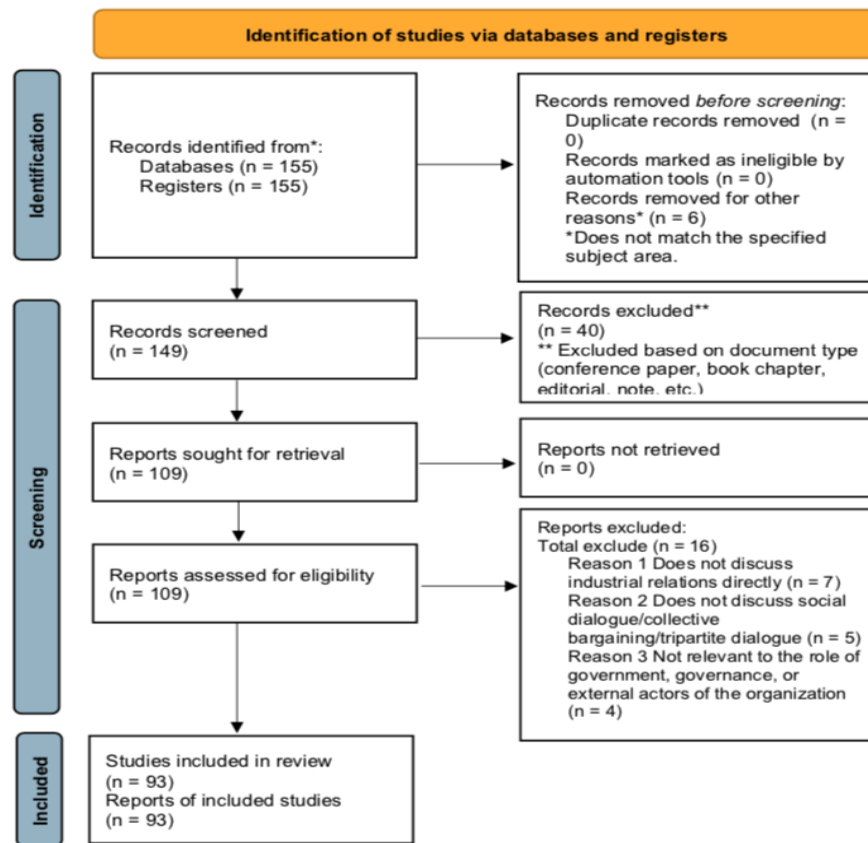
tren penelitian, tema-tema dominan, serta peluang pengembangan kajian mengenai dialog sosial, intervensi pemerintah, dan stabilitas hubungan industrial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan penelitian mengenai hubungan antara dialog sosial, intervensi pemerintah, dan stabilitas hubungan industrial melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR). Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual dengan memetakan perkembangan tema penelitian sekaligus mengidentifikasi peluang kajian mengenai peran pemerintah daerah dalam mendukung tata kelola hubungan industrial yang adaptif dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) yang dipadukan dengan analisis bibliometrik. SLR digunakan untuk mengidentifikasi, menyeleksi, dan mensintesis literatur secara sistematis (Tranfield et al., 2003), sedangkan analisis bibliometrik digunakan untuk memetakan tema dominan, hubungan antarkonsep, tren penelitian, dan kesenjangan penelitian (Donthu et al., 2021). Literatur diperoleh dari basis data *Scopus* karena memiliki cakupan jurnal internasional yang luas dan kualitas indeksasi yang tinggi (Mongeon & Paul-Hus, 2016). Pencarian dilakukan menggunakan kombinasi kata kunci dengan *Boolean operators* pada kolom *TITLE-ABS-KEY*, yaitu:

((*"industrial relations"* OR *"labour relations"* OR *"labor relations"* OR *"employment relations"*) AND (*"social dialogue"* OR *"tripartite dialogue"* OR *"collective bargaining"*) AND (*"local government"* OR *"regional government"* OR *governance* OR *"government intervention"*))

Artikel yang diikutkan memenuhi kriteria inklusi, yaitu terindeks *Scopus*, berupa artikel jurnal atau artikel ulasan (*review*), tersedia dalam bahasa Inggris, dan membahas hubungan industrial, dialog sosial, serta peran pemerintah. Dokumen berupa prosiding, *book chapter*, editorial, atau artikel yang tidak relevan dengan fokus penelitian dikeluarkan dari analisis. Proses seleksi mengikuti pedoman PRISMA 2020 (Page et al., 2021) sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1. Dari 155 dokumen yang teridentifikasi, sebanyak 6 dokumen dikeluarkan karena tidak sesuai bidang kajian, 40 dokumen dieliminasi berdasarkan jenis publikasi, dan 16 dokumen dikeluarkan setelah penelaahan judul serta abstrak karena tidak sesuai dengan fokus penelitian. Dengan demikian, sebanyak 93 artikel memenuhi kriteria dan digunakan sebagai bahan analisis.



Gambar 1. PRISMA 2020 Flow Diagram of the Literature Selection Process

Analisis bibliometrik dilakukan menggunakan VOSviewer (Van Eck & Waltman, 2010) untuk memetakan ko-okurensi kata kunci, kluster penelitian, dan keterkaitan antartopik. Selanjutnya, hasil pemetaan diinterpretasikan melalui SLR dengan mengelompokkan artikel berdasarkan tema, mengidentifikasi tren perkembangan penelitian, serta merumuskan kesenjangan penelitian yang menjadi dasar pembahasan dan rekomendasi penelitian selanjutnya.

HASIL DAN DISKUSI

Karakteristik Deskriptif Literatur

Tabel 1. *Distribution of publications by decade*

Tahun	Frekuensi
1961–1969	2
1970–1979	1
1980–1989	2
1990–1999	3
2000–2009	20
2010–2019	40
2020–2026	25
Total	93

Source: Compiled by the authors from Scopus-indexed publications (n = 93).

Analisis terhadap distribusi publikasi menunjukkan bahwa kajian mengenai hubungan industrial, dialog sosial, dan tata kelola pemerintahan mengalami perkembangan yang cukup dinamis dari waktu ke waktu. Berdasarkan data yang diperoleh, total terdapat 93 publikasi yang tersebar dalam rentang waktu tahun 1961 hingga 2026. Pada periode awal, yaitu 1961–1969, hanya ditemukan 2 publikasi, kemudian menurun menjadi 1 publikasi pada periode 1970–1979. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada masa tersebut perhatian akademik terhadap isu hubungan industrial yang dikaitkan dengan dialog sosial dan intervensi pemerintah masih relatif terbatas. Memasuki periode 1980–1989 dan 1990–1999, jumlah publikasi mulai menunjukkan peningkatan meskipun masih dalam jumlah yang kecil, masing-masing sebanyak 2 dan 3 publikasi. Perkembangan ini menandai mulai munculnya perhatian yang lebih serius terhadap perubahan hubungan industrial seiring meningkatnya dinamika ekonomi global dan perubahan struktur ketenagakerjaan.

Peningkatan yang lebih signifikan mulai terlihat pada periode 2000–2009, dengan total 20 publikasi. Hal ini menunjukkan bahwa isu hubungan industrial mulai mendapatkan perhatian yang lebih luas, terutama berkaitan dengan perkembangan *collective bargaining*, peran serikat pekerja, dan reformasi kebijakan tenaga kerja. Puncak perkembangan terjadi pada periode 2010–2019, dengan jumlah 40 publikasi, yang menjadi periode paling produktif dalam dataset ini. Tingginya jumlah publikasi pada periode ini menunjukkan bahwa isu hubungan industrial semakin menjadi perhatian utama, terutama dalam konteks globalisasi, fleksibilitas tenaga kerja, krisis ekonomi, dan perubahan model tata kelola organisasi. Sementara itu, pada periode 2020–2026, jumlah publikasi tercatat sebanyak 25 artikel. Meskipun belum melampaui periode sebelumnya, angka ini menunjukkan bahwa kajian di bidang ini masih terus berkembang dan tetap relevan. Secara umum, tren ini memperlihatkan bahwa hubungan industrial, dialog sosial, dan tata kelola pemerintahan merupakan isu yang semakin penting dalam menjawab tantangan dunia kerja modern.

Tabel 2. *Top 10 of sources/journals*

Rank	Journal	Documents
1	European Journal of <i>Industrial relations</i>	9
2	Journal of <i>Industrial relations</i>	8
3	International Labour Review	5
4	Transfer	3
5	British Journal of <i>Industrial relations</i>	3
6	Transfer: European Review of Labour and Research	3
7	The Annals of the American Academy of Political and Social Science	2
8	European Labour Law Journal	2
9	Journal of Labor Research	2
10	International Journal of Human Resource Management	2

Tabel 2 menunjukkan distribusi jurnal yang menjadi sumber utama publikasi dalam kajian hubungan industrial, dialog sosial, dan tata kelola pemerintahan. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar literatur terkonsentrasi pada jurnal-jurnal yang secara khusus berfokus pada studi hubungan industrial dan ketenagakerjaan. *European Journal of Industrial relations* tercatat sebagai jurnal dengan kontribusi publikasi tertinggi, yaitu sebanyak 9 artikel, diikuti oleh *Journal of Industrial relations* dengan 8 artikel. Sementara itu, *International Labour Review* memberikan kontribusi sebanyak 5 artikel, yang menunjukkan peran penting jurnal ini dalam memperkaya kajian mengenai hubungan kerja, regulasi ketenagakerjaan, dan dialog sosial. Beberapa jurnal lain seperti *Transfer*, *British Journal of Industrial relations*, dan *Transfer: European Review of Labour and Research* juga menunjukkan kontribusi yang cukup konsisten dalam pengembangan literatur di bidang ini.

Temuan ini memperlihatkan bahwa diskursus mengenai hubungan industrial, dialog sosial, dan tata kelola pemerintahan masih sangat erat dengan disiplin ilmu hubungan industrial dan ketenagakerjaan. Dominasi jurnal-jurnal tersebut menegaskan bahwa kajian ini tetap menjadi landasan utama dalam memahami dinamika hubungan kerja, perubahan kebijakan ketenagakerjaan, serta peran para aktor yang terlibat dalam menjaga stabilitas hubungan industrial. Selain itu, keberagaman jurnal yang muncul dalam dataset juga menunjukkan bahwa isu hubungan industrial tidak hanya dipahami dari perspektif hubungan kerja semata, tetapi juga mulai berkembang ke ranah hukum ketenagakerjaan, manajemen sumber daya manusia, dan kebijakan publik. Hal ini menunjukkan bahwa kajian hubungan industrial semakin bersifat multidisipliner dan terus berkembang mengikuti perubahan lingkungan organisasi dan dunia kerja.

Tabel 3. *The 10 most productive countries*

Rank	Country	Publications
1	United Kingdom	24
2	United States	20
3	Germany	7
4	Canada	6
5	Netherlands	6
6	Italy	6
7	China	4
8	Belgium	4
9	Spain	3
10	Austria	3

Source: Compiled by the authors from Scopus-indexed publications (n = 93).

Tabel 3 berikut menunjukkan distribusi negara asal publikasi dalam kajian hubungan industrial, dialog sosial, dan tata kelola pemerintahan. Hasil analisis memperlihatkan bahwa Inggris Raya menjadi negara dengan kontribusi publikasi tertinggi, yaitu sebanyak 24 artikel, diikuti oleh Amerika Serikat dengan 20 artikel. Dominasi kedua negara ini menunjukkan bahwa isu hubungan industrial masih menjadi perhatian utama dalam tradisi akademik negara-negara maju yang memiliki sejarah panjang dalam perkembangan sistem ketenagakerjaan modern. Selain itu, sejumlah negara di kawasan Eropa seperti Jerman (7), Belanda (6), Italia (6), Belgia (4), dan Spanyol (3) juga menunjukkan kontribusi yang cukup signifikan. Kuatnya dominasi negara-negara Eropa dalam dataset ini bukanlah hal yang mengherankan, mengingat kawasan tersebut memiliki tradisi yang mapan dalam praktik dialog sosial, *collective bargaining*, serta tata kelola tripartit yang telah lama menjadi fondasi dalam sistem hubungan industrial mereka. Keberadaan China (4) dalam daftar sepuluh besar juga menunjukkan bahwa perhatian terhadap hubungan industrial mulai berkembang di kawasan Asia, terutama seiring dengan perubahan struktur ekonomi, industrialisasi yang cepat, dan meningkatnya dinamika hubungan kerja di negara tersebut.

Secara keseluruhan, distribusi ini menunjukkan bahwa Eropa masih menjadi pusat perkembangan pemikiran dan praktik hubungan industrial, khususnya dalam konteks keterlibatan pemerintah, pekerja, dan pengusaha dalam membangun hubungan kerja yang lebih seimbang, stabil, dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, keterlibatan negara-negara di luar Eropa juga menunjukkan bahwa isu hubungan industrial telah berkembang menjadi perhatian global yang terus mengalami perubahan sesuai dengan konteks sosial, ekonomi, dan politik masing-masing negara.

Keyword Co-occurrence Analysis

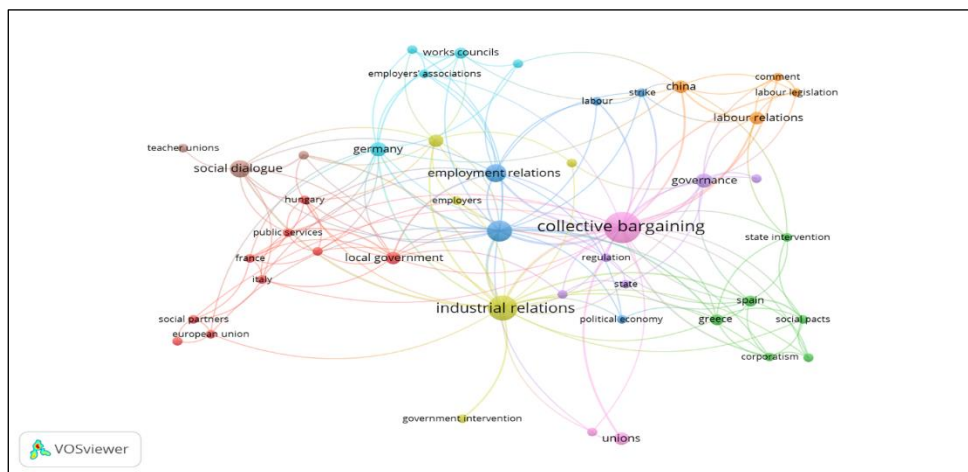
Proses seleksi literatur mengikuti pedoman PRISMA 2020 untuk memastikan transparansi dan konsistensi dalam identifikasi, penyaringan, dan pemilihan artikel yang relevan (Page et al., 2021; Tranfield et al., 2003). Selanjutnya, *keyword co-occurrence analysis* dilakukan menggunakan VOSviewer berdasarkan *author keywords* dari 93 publikasi terindeks Scopus untuk memetakan struktur konseptual, hubungan antartema, dan arah penelitian.

Visualisasi Jaringan

Gambar 2 menunjukkan jaringan *keyword co-occurrence* yang terbentuk dari literatur terpilih. Hasil visualisasi memperlihatkan bahwa *collective bargaining* dan *industrial relations* menempati posisi paling sentral dalam jaringan. Posisi ini mengindikasikan bahwa kedua

konsep tersebut merupakan fondasi utama dalam kajian hubungan industrial sekaligus menjadi penghubung berbagai tema penelitian lain. Dengan kata lain, pembahasan mengenai dialog sosial, hubungan kerja, maupun tata kelola kelembagaan umumnya masih dikembangkan dalam kerangka hubungan industrial dan mekanisme perundingan kolektif.

Keterkaitan yang kuat antara *employment relations*, *social dialogue*, *governance*, *government intervention*, dan *local government* menunjukkan bahwa fokus penelitian mulai bergeser dari hubungan bipartit antara pekerja dan pengusaha menuju pendekatan yang lebih kelembagaan dan kolaboratif. Pergeseran ini mencerminkan meningkatnya perhatian terhadap peran pemerintah dalam memfasilitasi dialog sosial, menyusun regulasi, serta menjaga stabilitas hubungan industrial di tengah perubahan lingkungan kerja. Namun demikian, posisi *local government* yang berada di bagian perifer jaringan dibandingkan *collective bargaining* dan *industrial relations* menunjukkan bahwa aspek pemerintahan daerah masih belum banyak dieksplorasi. Pola tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan penelitian mengenai kontribusi pemerintah daerah sebagai mediator, fasilitator, dan regulator dalam hubungan industrial. Temuan ini memperlihatkan bahwa literatur masih didominasi oleh pembahasan mengenai mekanisme hubungan industrial, sedangkan dimensi tata kelola pada tingkat lokal masih memerlukan perhatian yang lebih besar.



Gambar 2. Keyword Co-occurrence Network Visualization

Source: Authors' visualization using VOSviewer based on Scopus data (n = 93).

Klaster Utama Penelitian

Berdasarkan analisis *keyword co-occurrence*, diperoleh enam klaster penelitian sebagaimana disajikan pada Tabel 3. Klaster terbesar berpusat pada *collective bargaining*, *industrial relations*, dan *employment relations*, yang menunjukkan bahwa literatur masih didominasi oleh kajian mengenai mekanisme hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha. Di

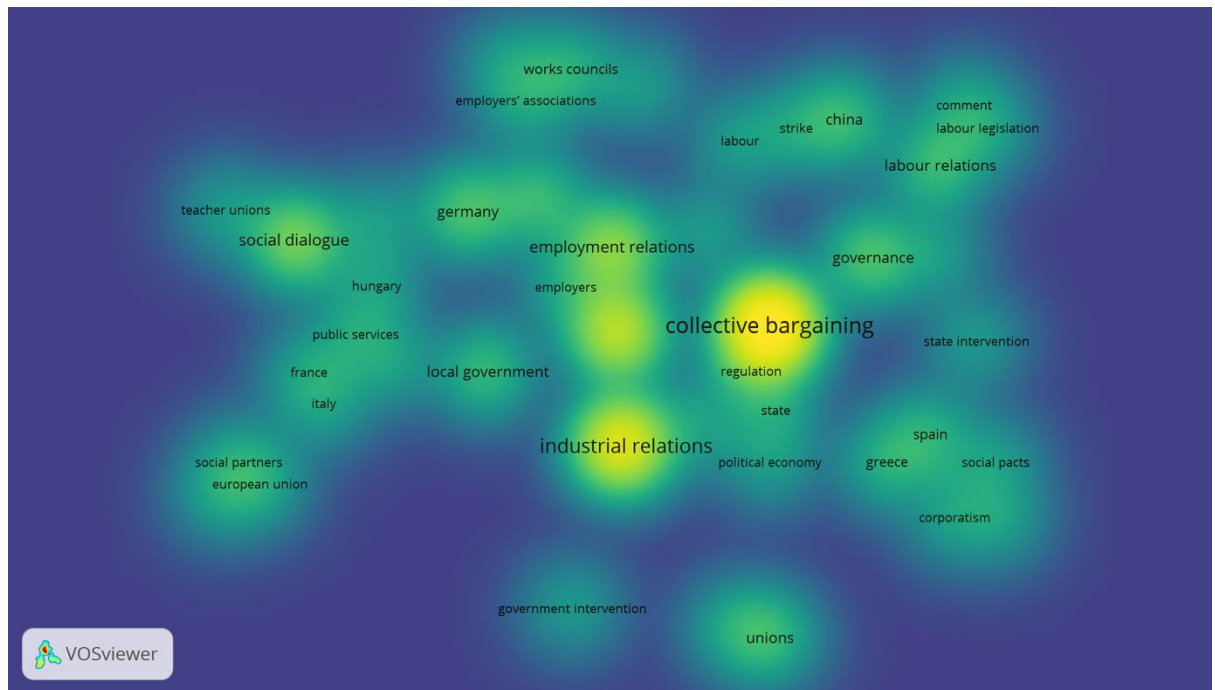
sisi lain, klaster *social dialogue*, *governance*, dan *state intervention* mengindikasikan berkembangnya perhatian terhadap peran aktor kelembagaan dalam menjaga stabilitas hubungan industrial. Sementara itu, klaster yang berkaitan dengan *local government* masih relatif kecil, sehingga menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah belum menjadi fokus utama dalam penelitian.

Tabel 3. *Major Research Clusters Identified from Keyword Co-occurrence Analysis*

Cluster	Color	Main Keywords	Thematic Interpretation
Cluster 1	Red	Social Dialogue, Social Partners, European Union, France, Italy, Public Services	Social Dialogue and Multi-Stakeholder Cooperation
Cluster 2	Green	<i>Collective bargaining</i> , <i>Industrial relations</i> , Employment Relations, Employers, Germany	Core <i>Industrial relations</i> and Employment Systems
Cluster 3	Blue	Labour, Political Economy, Regulation, Employment Relations	Labour Market and Institutional Regulation
Cluster 4	Yellow	Works Councils, Employers' Associations, China, Strike	Worker Representation and Collective Participation
Cluster 5	Purple	Governance, State Intervention, State, Regulation	Governance and Institutional Intervention
Cluster 6	Pink	Unions, <i>Collective bargaining</i>	Trade Union Representation and Collective Negotiation

Source: Authors' visualization using VOSviewer based on Scopus data (n = 93).

Struktur klaster tersebut menunjukkan adanya pergeseran kajian dari pendekatan hubungan industrial yang berorientasi pada negosiasi pekerja-pengusaha menuju perspektif tata kelola yang lebih kolaboratif. Namun, keterkaitan antara dialog sosial dan peran pemerintah daerah masih belum berkembang kuat, sehingga menjadi peluang penelitian untuk menjelaskan kontribusi pemerintah daerah dalam memfasilitasi dialog sosial dan menjaga stabilitas hubungan industrial. Hasil *density visualization* pada Gambar 3 memperkuat temuan tersebut. Kepadatan tertinggi terdapat pada *collective bargaining* dan *industrial relations*, sedangkan *governance*, *social dialogue*, dan terutama *local government* memiliki kepadatan yang lebih rendah. Pola ini menunjukkan bahwa penelitian masih terkonsentrasi pada tema-tema klasik, sementara dimensi tata kelola pemerintahan, khususnya pada tingkat daerah, masih relatif kurang dieksplorasi.

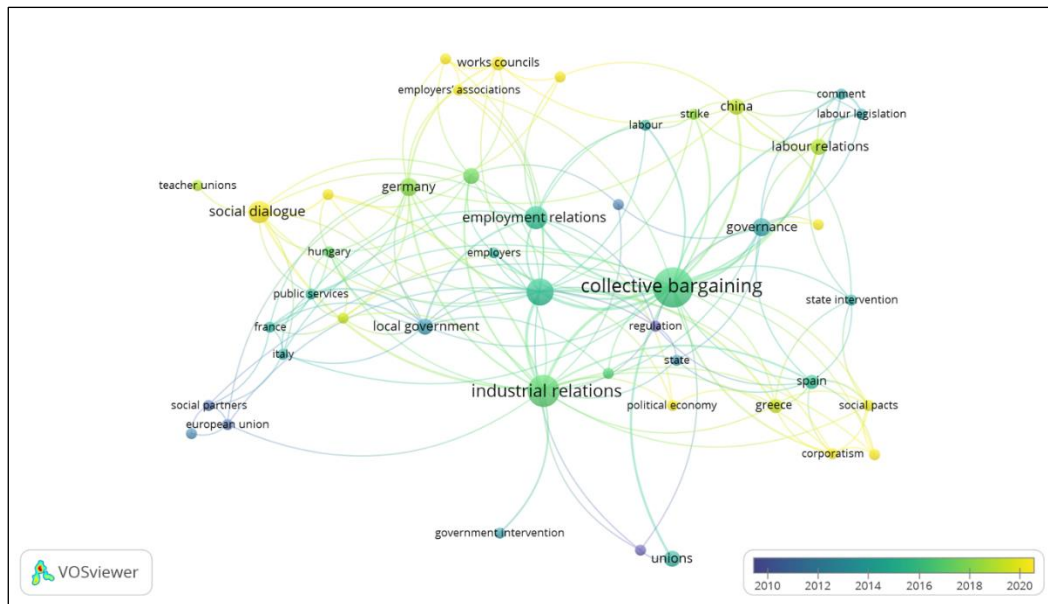


Gambar 3. *Density Visualization of Research Themes*

Source: Authors' visualization using VOSviewer based on Scopus data (n = 93).

Perkembangan Tema Penelitian

Analisis *overlay visualization* menggunakan VOSviewer menunjukkan adanya pergeseran fokus penelitian dari kajian hubungan industrial konvensional menuju pendekatan yang lebih kolaboratif. Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4, tema-tema awal didominasi oleh *labour relations*, *industrial relations*, *collective bargaining*, dan *European Union*, yang berfokus pada mekanisme hubungan kerja, regulasi ketenagakerjaan, serta perundingan antara pekerja dan pengusaha. Pada periode berikutnya, perhatian penelitian berkembang ke arah *social dialogue*, *works councils*, *employers' associations*, dan *corporatism*, yang mencerminkan meningkatnya minat terhadap tata kelola partisipatif dan keterlibatan multipihak dalam menjaga stabilitas hubungan industrial. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa hubungan industrial tidak lagi dipahami semata sebagai interaksi antara pekerja dan pengusaha, tetapi sebagai sistem yang melibatkan berbagai aktor kelembagaan dalam proses pengambilan keputusan dan penyelesaian konflik. Dengan demikian, dialog sosial semakin diposisikan sebagai mekanisme penting untuk memperkuat koordinasi, membangun kepercayaan, dan menciptakan hubungan industrial yang berkelanjutan.



Gambar 4. *Overlay Visualization of Research Themes*

Source: Authors' visualization using VOSviewer based on Scopus data (n = 93).

Tema-tema Baru yang Muncul dalam Kajian Hubungan Industrial

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa *social dialogue* menjadi salah satu tema yang mengalami perkembangan paling pesat dalam literatur terkini. Munculnya tema *works councils*, *employers' associations*, dan *corporatism* memperlihatkan pergeseran dari pendekatan yang berorientasi pada negosiasi formal menuju model tata kelola yang lebih kolaboratif. Sebaliknya, *local government* dan *governance* masih memiliki intensitas kajian yang relatif rendah meskipun keduanya berperan sebagai penghubung antara hubungan industrial dan tata kelola kelembagaan. Temuan ini mengindikasikan adanya *research gap*, yaitu masih terbatasnya penelitian yang mengkaji peran pemerintah daerah sebagai regulator, mediator, dan fasilitator dialog sosial dalam menjaga stabilitas hubungan industrial. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu memperluas kajian mengenai kontribusi pemerintah daerah dalam membangun sistem hubungan industrial yang adaptif dan berkelanjutan.

Hubungan Industrial dalam Perspektif Teori Organisasi

Hasil analisis bibliometrik menunjukkan bahwa kajian hubungan industrial masih didominasi tema-tema klasik seperti *collective bargaining*, *industrial relations*, dan *trade unions*. Namun, analisis jaringan dan *overlay visualization* memperlihatkan pergeseran menuju isu *social dialogue*, *governance*, dan keterlibatan pemerintah. Pergeseran ini mengindikasikan bahwa hubungan industrial semakin dipahami sebagai sistem yang dipengaruhi oleh interaksi berbagai aktor dan lingkungan kelembagaan. Dalam perspektif *Open System Theory*, organisasi

dipandang sebagai sistem terbuka yang keberlangsungannya dipengaruhi oleh lingkungan eksternal, termasuk regulasi, kebijakan pemerintah, dan kepentingan para pemangku kepentingan (Scott & Davis, 2015). Temuan penelitian mendukung perspektif tersebut karena kata kunci *industrial relations*, *employment relations*, *collective bargaining*, dan *social dialogue* membentuk jaringan yang saling terhubung. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan industrial tidak hanya ditentukan oleh relasi pekerja dan pengusaha, tetapi juga oleh institusi pemerintah, serikat pekerja, dan aktor kelembagaan lainnya (Kaufman, 2015; Wilkinson et al., 2020). Dengan demikian, stabilitas hubungan industrial merupakan hasil interaksi antara mekanisme internal organisasi dan lingkungan eksternal (Hyman, 2018; Gumbrell-McCormick & Hyman, 2019).

Temuan *overlay visualization* juga menunjukkan bahwa *social dialogue* merupakan tema yang berkembang dalam publikasi terkini. Pergeseran ini mencerminkan perubahan fokus dari pendekatan yang berorientasi pada penyelesaian konflik melalui *collective bargaining* menuju mekanisme koordinasi yang lebih kolaboratif. Dialog sosial berperan sebagai sarana membangun komunikasi, kepercayaan, dan koordinasi antara pekerja, pengusaha, serta pemerintah sehingga mampu meningkatkan adaptabilitas organisasi terhadap perubahan lingkungan (Molina & Rhodes, 2017; Eurofound, 2021). Perspektif ini memperluas pemahaman bahwa efektivitas hubungan industrial tidak hanya ditentukan oleh hasil negosiasi, tetapi juga oleh kualitas tata kelola dan interaksi antarpemangku kepentingan (Traxler, 2018).

Temuan tersebut sekaligus menjelaskan kesenjangan penelitian yang teridentifikasi melalui analisis bibliometrik. Meskipun tema *governance* mulai memperoleh perhatian, pembahasan mengenai *local government* masih relatif terbatas. Padahal, dalam perspektif teori organisasi, pemerintah daerah merupakan bagian dari lingkungan eksternal yang berperan sebagai regulator, mediator, dan fasilitator dialog sosial. Oleh karena itu, penelitian mendatang perlu mengkaji secara lebih mendalam bagaimana peran pemerintah daerah memengaruhi stabilitas hubungan industrial pada berbagai konteks kelembagaan.

Pemerintah Daerah sebagai Aktor Lingkungan Eksternal

Analisis bibliometrik menunjukkan bahwa tema *governance* dan *local government* mulai terhubung dengan kajian hubungan industrial, meskipun frekuensinya masih jauh lebih rendah dibandingkan *collective bargaining* dan *industrial relations*. Pola ini menunjukkan bahwa perhatian penelitian mulai bergeser dari hubungan bipartit pekerja dan pengusaha menuju pendekatan yang mempertimbangkan peran aktor kelembagaan dalam menjaga stabilitas hubungan industrial. Dalam perspektif *External Environment and Organizational*

Relationships, organisasi bergantung pada aktor eksternal yang memengaruhi legitimasi, regulasi, dan stabilitas operasional (Scott & Davis, 2015). Oleh karena itu, pemerintah daerah tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai mediator, fasilitator dialog sosial, dan koordinator berbagai pemangku kepentingan (Bechter et al., 2012; Traxler, 2018). Peran tersebut menjadi semakin penting karena konflik hubungan industrial tidak hanya memengaruhi organisasi, tetapi juga berdampak pada investasi, aktivitas ekonomi, dan stabilitas sosial di tingkat lokal (Eurofound, 2021). Temuan ini memperluas perspektif hubungan industrial dengan menempatkan pemerintah daerah sebagai bagian integral dari lingkungan eksternal organisasi.

Research Gap dan Arah Penelitian Selanjutnya

Hasil analisis menunjukkan bahwa literatur masih didominasi oleh tema *collective bargaining*, *industrial relations*, dan *trade unions*, sedangkan kajian mengenai *governance* dan terutama *local government* masih relatif terbatas. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa penelitian terdahulu lebih banyak menitikberatkan pada hubungan antara pekerja dan pengusaha, sementara peran pemerintah daerah dalam membangun dialog sosial, memediasi konflik, dan menjaga stabilitas hubungan industrial belum banyak dieksplorasi.

Temuan tersebut mengidentifikasi celah penelitian yang penting, yaitu perlunya mengembangkan perspektif hubungan industrial yang melibatkan aktor eksternal sebagai bagian dari sistem tata kelola. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji efektivitas peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi dialog sosial, memperkuat koordinasi multipihak, serta menciptakan stabilitas hubungan industrial pada berbagai konteks kawasan industri. Selain itu, integrasi perspektif *Open System Theory*, *Stakeholder Theory*, dan *External Environment and Organizational Relationships* berpotensi memperkaya pemahaman mengenai bagaimana tata kelola lokal memengaruhi efektivitas organisasi, iklim investasi, dan keberlanjutan hubungan industrial (Scott & Davis, 2015; Freeman, 1984; Molina & Rhodes, 2017).

Tabel 4. *Research gaps and future research directions based on bibliometric findings*

Research Theme	Evidence from Dataset (n = 93)	Representative Sources (Authors)	Interpretation	Research Opportunity
<i>Collective bargaining</i>	23 keyword occurrences	Marginson (2015); Müller & Schulten (2019); Leonardi (2018)	Most dominant topic in the literature	Examine broader governance implications beyond wage negotiation processes
<i>Industrial relations</i>	15 keyword occurrences	Baccaro & Howell (2017); Hyman	Core research domain	Expand analysis toward multi-stakeholder

		(2018); Visser (2019)		<i>industrial relations systems</i>
Trade Unions	11 keyword occurrences	Gumbrell-McCormick & Hyman (2019); Upchurch & Mathers (2018)	Strong focus on worker representation	Investigate new forms of worker participation and social dialogue
Employment Relations	8 keyword occurrences	Wilkinson et al. (2020); Kaufman (2015)	Traditional employer–employee perspective remains dominant	Explore relationships between employment systems and external governance actors
Social Dialogue	7 keyword occurrences	Eurofound (2021); Molina & Rhodes (2017)	Increasingly important collaborative mechanism	Assess effectiveness of dialogue-based conflict resolution in industrial regions
Governance	5 keyword occurrences	Bechter et al. (2012); Traxler (2018)	Emerging but still limited theme	Examine governance structures supporting <i>industrial relations</i> stability
Local Government	4 keyword occurrences	Limited dedicated studies identified in the dataset	Underrepresented despite strategic relevance	Investigate the role of local governments as facilitators, mediators, and external environmental actors

Source: Authors' analysis based on author keyword occurrences extracted from 93 Scopus-indexed publications and representative studies identified within the dataset.

KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis perkembangan kajian mengenai hubungan industrial, dialog sosial, dan tata kelola pemerintahan melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) dan analisis bibliometrik terhadap 93 publikasi yang terindeks Scopus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literatur masih didominasi oleh tema *collective bargaining*, *industrial relations*, *trade unions*, dan *employment relations*. Namun, analisis jaringan dan *overlay visualization* mengindikasikan pergeseran perhatian penelitian menuju isu *social dialogue* dan *governance*, yang mencerminkan semakin pentingnya pendekatan kolaboratif dalam pengelolaan hubungan industrial.

Temuan utama penelitian ini adalah masih terbatasnya kajian mengenai peran *local government* dalam literatur hubungan industrial. Meskipun frekuensinya relatif rendah, posisinya dalam jaringan kata kunci menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai penghubung antara dialog sosial, tata kelola, dan hubungan industrial. Temuan ini memberikan kontribusi konseptual dengan menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor lingkungan eksternal yang berperan dalam mendukung stabilitas hubungan industrial melalui fungsi regulasi, mediasi, dan koordinasi antarpemangku kepentingan.

Penelitian ini terbatas pada publikasi yang terindeks Scopus dan menggunakan pendekatan bibliometrik serta sintesis literatur. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu memperluas sumber data dan menguji secara empiris bagaimana peran pemerintah daerah memengaruhi stabilitas hubungan industrial pada berbagai konteks kelembagaan dan kawasan industri.

REFERENSI

- Baccaro, L., & Howell, C. (2017). *Trajectories of neoliberal transformation: European industrial relations since the 1970s*. Cambridge University Press.
- Bechter, B., Brandl, B., & Meardi, G. (2012). Sectors or countries? Typologies and levels of analysis in comparative industrial relations. *European Journal of Industrial relations*, 18(3), 185–202.
- Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. M. (2021). How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 133, 285–296.
- Eurofound. (2021). *Industrial relations and social dialogue: Annual review 2020*. Publications Office of the European Union.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. Pitman.
- Gumbrell-McCormick, R., & Hyman, R. (2019). *Trade unions in Western Europe: Hard times, hard choices*. Oxford University Press.
- Hyman, R. (2018). What future for industrial relations in Europe? *Employee Relations*, 40(4), 569–579.
- Kaufman, B. E. (2015). The evolving concept of strategic HRM. *Human Resource Management Review*, 25(4), 419–430.
- Leonardi, S. (2018). Collective bargaining and inclusive labour market governance in Europe. *Transfer: European Review of Labour and Research*, 24(2), 157–170.
- Marginson, P. (2015). Coordinated bargaining in Europe: From incremental corrosion to frontal assault? *European Journal of Industrial relations*, 21(2), 97–114.
- Molina, O., & Rhodes, M. (2017). The political economy of adjustment in mixed market economies: A study of social dialogue in Europe. *Economic and Industrial Democracy*, 38(3), 473–495.
- Müller, T., & Schulten, T. (2019). The European minimum wage debate and the revival of collective bargaining. *Transfer: European Review of Labour and Research*, 25(3), 267–281.
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71.
- Scott, W. R., & Davis, G. F. (2015). *Organizations and organizing: Rational, natural, and open systems perspectives*. Routledge.
- Traxler, F. (2018). Governance and industrial relations in Europe: Theoretical reflections and empirical developments. *European Journal of Industrial relations*, 24(1), 5–20.
- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. *British Journal of Management*, 14(3), 207–222.
- Upchurch, M., & Mathers, A. (2018). Neoliberal globalization and trade unionism: Toward radical political unionism? *Critical Sociology*, 44(2), 209–224.

- Van Eck, N. J., & Waltman, L. (2010). Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. *Scientometrics*, 84(2), 523–538.
- Visser, J. (2019). Trade unions in the balance. *International Labour Review*, 158(1), 3–25.
- Wilkinson, A., Donaghey, J., Dundon, T., & Freeman, R. B. (2020). *Handbook of research on employee voice*. Edward Elgar Publishing